

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkelainan

Oleh: Herry Widyastono^{*)}

Abstrak: Anak berkelainan berada di seluruh pelosok tanah air (kecamatan/desa), sedangkan sekolah untuk anak berkelainan, yakni Sekolah Luar Biasa (SLB), pada umumnya berada di kabupaten/kota, sehingga banyak anak berkelainan dari keluarga yang kurang mampu ekonominya tidak bersekolah karena kesulitan transportasi dan sekolah umum (SD/SMP) terdekat pada umumnya tidak bersedia menerimanya karena ketidaktahuan cara melayaninya. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan menghambat program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan terobosan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan berbagai alternatif penempatan anak berkelainan pada: (1) kelas reguler tanpa tambahan bimbingan khusus; (2) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam; (3) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar; (4) kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler; (5) kelas khusus penuh; (6) sekolah khusus; (7) sekolah berasrama (panti); atau (8) tempat khusus. Setiap penyelenggara pendidikan dapat memilih alternatif penempatan anak berkelainan yang didasarkan pada: (a) jumlah anak berkelainan yang akan dilayani; (b) jenis kelainan masing-masing anak; (c) gradasi (tingkat) kelainan anak; (d) ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan, serta (e) sarana-prasarana yang tersedia.

Kata Kunci: Anak Berkelainan, Pendidikan Khusus, Sekolah Luar Biasa, Pendidikan Terpadu, dan Pendidikan Inklusi.

^{*)} Dr. Herry Widyastono adalah Ahli Peneliti Bidang Pendidikan serta Kepala Bidang Kurikulum Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Khusus pada Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.

1. Pendahuluan

Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warganegara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut ditegaskan pada ayat (2) bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, menal, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selama ini, pendidikan khusus bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Baru belakangan pemerintah mulai mengadakan perintisan pendidikan inklusi, tapi perkembangannya kurang menggembirakan.

SLB sebagai lembaga pendidikan khusus untuk anak berkelainan menampung anak berkelainan dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras, dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak berkelainan dalam satu atap, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak

tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan/atau tunaganda.

Sementara itu, pendidikan terpadu adalah sekolah umum yang juga menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Dengan kata lain, anak berkelainan mengikuti sistem yang berlaku bagi anak normal di sekolah umum. Namun pendidikan terpadu ini perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak berkelainan karena merasa tidak mampu melayaninya.

Di sisi lain, SLB pada umumnya lokasinya berada di kabupaten/kota, padahal anak-anak berkelainan tersebar di seluruh daerah (kecamatan/desa), tidak hanya di kabupaten/kota. Akibatnya, sebagian anak berkelainan, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah; sementara kalau akan disekolahkan di sekolah umum (SD/SMP) terdekat, sekolah-sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain mungkin dapat diterima di SD/SMP terdekat, namun karena

ketiadaan pelayanan pendidikan khusus bagi mereka, akibatnya mereka tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah.

Permasalahan di atas akan berakibat pada kegagalan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah. Untuk mengantisipasi hal di atas, dan dalam rangka menyuksekkan program wajib belajar pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak berkelainan, baik anak-anak berkelainan yang telah memasuki sekolah umum (SD/SMP) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus, maupun anak-anak berkelainan yang belum sempat mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya.

Untuk mewujudkan harapan di atas, karena tidak mungkin membangun SLB di tiap kecamatan/desa sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama, maka diperlukan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dengan menggunakan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Sehubungan dengan hal di atas, anak berkelainan perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah (SD/SMP) terdekat, namun sekolah-sekolah terdekat tersebut perlu mempersiapkan segala sesuatunya, antara lain kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi anak berkelainan.

2. Kajian Literatur

2.1 Konsepsi

Sejak digulirkannya konsep *mainstreaming* pada tahun 80-an dalam pendidikan anak berkelainan, ada upaya kuat melaksanakan pendidikan bagi anak berkelainan secara terpadu, bahkan secara inklusif (terpadu penuh), dengan anak normal di sekolah umum. Apalagi setelah ada pernyataan Salamanca

pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Anak Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa "prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka."

Dalam perkembangannya, pendidikan inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat bagi setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan perseorangannya dapat terpenuhi.

Selanjutnya Staub dan Peck (1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di

kelas reguler pada sekolah umum. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler pada sekolah umum merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Sementara itu, Sapon-Shevin (dalam O'Neil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas.

Di lain pihak, Vaughn *et al.* (2000) mengatakan bahwa dalam praktik, istilah inklusi sering dipakai

bergantian dengan istilah *mainstreaming*, yang secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan sesuai dengan kebutuhan perseorangan. Anak berkelainan dapat ditempatkan pada alternatif berikut: (1) kelas reguler tanpa tambahan bimbingan khusus; (2) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam; (3) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar; (4) kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler; (5) kelas khusus penuh; (6) sekolah khusus; (7) sekolah berasrama (panti); atau (7) tempat khusus. Filosofinya adalah inklusi, tetapi dalam praktiknya menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

Di Amerika Serikat (Ashman dan Elkins, 1994), diperkirakan hanya sekitar 0,5% anak berkelainan yang bersekolah di sekolah khusus (alternatif 6), lainnya berada di sekolah biasa dengan beraneka ragam penempatan, mulai dari kelas reguler tanpa bimbingan khusus (alternatif 1) sampai dengan kelas khusus penuh (alternatif 5).

Sedangkan di Inggris pada tahun 1980-1990-an peserta didik di sekolah khusus menurun dari sembilan juta menjadi sekitar dua juta

orang karena kembali ke sekolah biasa (Warnock, 1978), dan populasi peserta didik (sekitar 2 juta orang) di sekolah khusus kurang dari 3% dari jumlah anak berkelainan (Fish, 1985).

Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara Barat sejak tahun 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Hasil penelitian merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat, namun sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak berkelainan secara tepat karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker *et al.*, 1995).

Beberapa peneliti kemudian melakukan meta analisis (menganalisis hasil-hasil penelitian yang sudah ada). Meta analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 hasil penelitian, Wang dan Baker (1986) terhadap 11 hasil penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 hasil penelitian, sehingga totalnya terhadap 74 hasil penelitian, menunjukkan bahwa pendidikan

inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun perkembangan sosial anak berkelainan dan teman sebayanya (termasuk anak normal).

2.2 Implikasi Managerial Pendidikan Inklusi

Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusi adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan perseorangan siswa. Untuk itu Sapon-Shevin (dalam Sunardi, 1997) mengemukakan lima profil pembelajaran di sekolah inklusif, yaitu:

- 1) Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya.
- 2) Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar kelas yang heterogen

memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Pembelajaran di kelas inklusi akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar siswa dan bahan belajar tematik.

- 3) Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Model kelas tradisional di mana seorang guru secara sendirian berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus bergeser dengan model antar siswa saling bekerja sama, saling mengajar dan belajar, dan secara aktif saling berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, melainkan untuk saling belajar dan mengajar dengan yang lain.
- 4) Pendidikan inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus menerus dan penghapusan

hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari pendidikan inklusi adalah pengajaran dengan tim, kolaborasi dan konsultasi, dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan bantuan perseorangan yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, seperti dengan para profesional, ahli bina bicara, petugas bimbingan, guru pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerjasama dengan orang lain secara baik, diperlukan pelatihan dan dorongan secara terus-menerus.

- 5) Pendidikan inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung kepada partisipasi aktif dari orang tua pada pendidikan anaknya, misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) dan bantuan dalam belajar di rumah.

2.3 Kontroversi Pendidikan Inklusi

Seperti halnya di negara asalnya, pendidikan inklusi di Indonesia pun masih kontroversial (Sunardi, 1997).

Para pendukung konsep pendidikan inklusi mengajukan argumen antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di sekolah khusus (SLB) menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak;
- 2) Biaya sekolah khusus relatif lebih mahal dari pada sekolah umum;
- 3) Sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negatif pada anak;
- 4) Banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat;
- 5) Anak berkelainan harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat lainnya.

Sedangkan para pakar yang mempertahankan penyediaan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan berargumen sebagai berikut.

- 1) Peraturan perundangan yang berlaku mensyaratkan bahwa bagi

anak berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinum;

- 2) Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan;
- 3) Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada di kelas reguler bersama teman-teman seusianya yang normal. Mereka beranggapan bahwa anaknya yang bersekolah di sekolah khusus memperoleh perhatian guru lebih intensif;
- 4) Pada umumnya sekolah reguler belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya pendidikannya.

Oleh karena itu, meskipun sudah ada sekolah inklusi, keberadaan sekolah khusus (segregasi) seperti SLB masih diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang memerlukan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Melihat sistem pendidikan di Indonesia yang berbeda dengan sistem pendidikan negara lainnya,

misalnya adanya sistem pembelajaran dan penilaian klasikal, sistem kenaikan kelas, dan sebagainya, maka model pendidikan inklusi yang lebih sesuai adalah model yang mengasumsikan bahwa inklusif sama dengan *mainstreaming*, seperti pendapat Vaughn *et al.* (2000). Penempatan anak berkelainan di sekolah umum dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:

- 1) Kelas reguler tanpa tambahan bimbingan khusus. Anak berkelainan belajar bersama anak normal, di kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan sistem yang sama.
- 2) Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam. Anak berkelainan belajar bersama anak normal, di kelas yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, dengan sistem yang sama. Tetapi bila ada kesulitan sebagai akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus di dalam kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.
- 3) Kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar. Anak berkelainan belajar bersama anak normal, di kelas yang sama,

menggunakan kurikulum yang sama, dengan sistem yang sama. Tetapi bila ada kesulitan sebagai akibat dari kelainannya, mereka diberi bimbingan khusus di luar kelas oleh guru yang bersangkutan dan/atau oleh guru pendidikan khusus.

4) Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler bersama anak berkelainan lainnya. Tetapi untuk mata-mata pelajaran tertentu, seperti olah raga, kerajinan tangan, dan kesenian, mereka dapat belajar bersama anak normal di kelas yang sama. Ketika belajar di kelas khusus mereka menggunakan kurikulum SLB yang sesuai dengan kelainannya, tetapi ketika belajar di kelas reguler mereka bersama-sama anak normal menggunakan kurikulum anak normal.

5) Kelas khusus penuh. Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler bersama anak berkelainan lainnya. Mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang normal pada saat jam istirahat atau pada saat upacara. Kurikulumnya menggunakan kurikulum SLB

yang sesuai dengan kelainannya.

6) Sekolah khusus. Anak berkelainan belajar di sekolah khusus, seperti Sekolah Luar Biasa, dengan menggunakan kurikulum SLB yang sesuai dengan kelainannya.

7) Sekolah berasrama (panti). Anak berkelainan belajar di sekolah khusus, seperti Sekolah Luar Biasa, dengan menggunakan kurikulum SLB yang sesuai dengan kelainannya. Di sekolah ini disediakan asrama (panti) bagi para siswanya.

8) Tempat khusus. Anak berkelainan belajar di tempat khusus, misalnya di rumah, di rumah sakit, maupun tempat-tempat lainnya, dengan guru pendidikan khusus dan para profesional yang terkait.

Dengan demikian filosofinya adalah inklusi, tetapi dalam prakteknya menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

- SLB merupakan sekolah khusus bagi anak berkelainan, yang pada umumnya berada di kabupaten/kota, sedangkan anak berkelainan tidak hanya tinggal di kabupaten/

kota, melainkan berada di seluruh pelosok tanah air (kecamatan/desa).

- Banyak anak berkelainan dari keluarga yang kurang mampu ekonominya tidak bersekolah karena lokasi SLB jauh dari domisilinya sehingga kesulitan transportasi, selain itu karena sekolah umum (SD/SMP) terdekat pada umumnya tidak bersedia menerimanya karena ketidak-tahuan cara melayaninya.
- Selain di SLB, penyelenggaraan pendidikan untuk anak ber-kelainan dapat berbentuk pendidikan terpadu atau pen-didikan inklusi di sekolah umum.
- Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia masih kontroversial seperti di negara asalnya, ada yang setuju dan ada yang menolak.

4.2 Saran

- Sambil tetap meningkatkan mutu SLB, pemerintah perlu melakukan

terobosan berupa penyeleng-garaan pendidikan terpadu dan pendidikan inklusi dengan berbagai alternatif penempatan anak berkelainan pada: (1) kelas reguler tanpa tambahan bim-bingan khusus; (2) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di dalam; (3) kelas reguler dengan tambahan bimbingan khusus di luar; (4) kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas reguler; (5) kelas khusus penuh; (6) sekolah khusus; (7) sekolah berasrama (panti); atau (8) tempat khusus.

- Setiap penyelenggara pendidikan dapat memilih alternatif penem-patan anak berkelainan, yang didasarkan pada: (a) jumlah anak berkelainan yang akan dilayani; (b) jenis kelainan masing-masing anak; (c) gradasi (tingkat) kelainan anak; (d) ketersediaan dan kesiapan tenaga kepen-didikan, serta (e) sarana-prasa-rana yang tersedia.

Pustaka Acuan

- Ashman, A. dan Elkins, J. 1994. *Educating Children with Special Needs*. New York: Prentice Hall.
- Baker, E.T. 1994. *Meta-Analysis Evidence for Non-inclusive Educational Practices*. Dissertation. Temple University.
- Baker, E.T., Wang, M.C. dan Walberg, H.J. 1995. The Effects of Inclusion on

Learning. *Educational Leadership*. 52(4) 33-35.

Carlberg, C. dan Kavale, K. 1980. The Efficacy of Special Class vs Regular Class Placement for Exceptional Children: A Metaanalysis. *The Journal of Special Education*. 14, 295-305.

Fish, J. 1985. *Educational Opportunities for All*. London: Inner London Educational Authority.

O'Neil, J. 1995. Can Inclusion Work? A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Educational Leadership*. 52 (4) 7-11.

Stainback, W. dan Stainback, S. 1990. *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H. Brooks.

Staub, D. dan Peck, C.A. 1995. What are the Outcomes for Nondisabled Students? *Educational Leadership*. 52 (4) 36-40.

Sunardi. 1997. *Perkembangan PLB dari Masa ke Masa*. Paper Temu Ilmiah Program Studi PLB di Bandung.

Warnock, H.M. 1978. *Special Educational Needs: Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Young People*. London: Her Majesty's Stationary Office.

Vaughn, S., Bos, C.S., dan Schumn, J.S. 2000. *Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Students in the General Education Classroom*. Boston: Allyn Bacon.